

KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG DI DESA TANJUNG LAPANG KILOMETER DELAPAN KABUPATEN MALINAU

Frenly Sukarno¹

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh pentingnya koordinasi dalam pengelolaan objek wisata dimana dalam situasi ini menempatkan Dinas Pariwisata Dan Dinas kehutanan yang melakukan koordinasi dalam pengelolaan objek wisata, untuk melaksanakan koordinasi sehingga tercapainya suatu tujuan dengan baik harus melakukan “komunikasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ” dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kemampuan dinas pariwisata dan dinas kehutanan dalam melakukan koordinasi pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang di desa tanjung lapang kilometer delapan kabupaten malinau. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi, tanya jawab dan dokumen research.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dinas pariwisata dan dinas kehutanan pada saat melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang masih kurang maksimal dilihat dari tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sehingga penulis menyarankan agar kepala dinas pariwisata dan kepala dinas kehutanan hendaknya pro-aktif melaksanakan koordinasi dalam bentuk komunikasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, melalui organisasi yang dipimpin nya. Disamping itu pula disarankan agar kepala dinas pariwisata dan kepala dinas kehutanan serta lembaga lainnya yang berada di sekitar dinas pariwisata dan dinas kehutanan harus berusaha mengajak pengurus-pengurus yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang untuk melihat persoalan apa pun yang membutuhkan koordinasi sebagai tanggung jawab bersama.

Kata Kunci: *koordinasi, pengelolaan, objek wisata*

Pendahuluan

Dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: frenlywesly@gmail.com

kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sepanjang perjalanan sejarah umat manusia selalu merupakan sumber daya alam yang amat penting untuk kelangsungan hidupnya. Kenyataan sejarah telah menunjukkan pula, untuk kelangsungan hidupnya itu, manusia baik sebagai individu, maupun sebagai makhluk sosial serta sebagai makhluk ciptaan Tuhan senantiasa melakukan hubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sehingga pemerintah berkewajiban dalam mengelola sumber daya alam dalam mensejahterahkan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya pasal 33 UUD 1945 kemudian dijelaskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rinci yaitu. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang kehutanan, dan dimana Indonesia memiliki luas hutan 130 juta hektar dari 180 juta hektar luas Indonesia, dan Indonesia memiliki luas hutan lindung 32.43 hektar salah satu hutan lindung yang berada di Indonesia ialah, taman nasional kayan mentarang, yang sekarang menjadi objek wisata.

Menurut undang-undang RI NO 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, tidak ada larangan dalam mengolah hutan lindung menjadi tempat pariwisata selama ekosistem yang dilindungi tidak terganggu dan juga ada undang-undang yang memperkuat dengan kata lain hutan lindung bisa dijadikan tempat pariwisata dengan adanya keputusan presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung dan undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Ayat (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Ayat (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Kerangka Dasar Teori

1. Pengertian koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut E.F.L. Brech (Hasibuan, 2007:85), koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Sedangkan Mc. Farland (Handyaningrat, 1985:89) koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-

kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Talizuduhu Ndraha dalam *Kybernology* (2003:291): koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama, secara bersama mengingat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-Beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan lain.

Koordinasi timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan pada saat bersamaan. Mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang sama, dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting, Dan koordinasi memiliki dua cabang yaitu :

- a) Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, dimana antara yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarchies. Hal ini juga dapat dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkhis, karena satu dengan lainnya berada pada satu garis komando (line of command).
- b) Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkooordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkatnya eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya kedua mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi.

Sifat koordinasi

Dalam beberapa teori-teori yang dijumpai ada beberapa sifat koordinasi yakni:

- a) Koordinasi adalah dinamis bukan statis.
- b) Koordinasi menekan pandangan meyeluruh oleh seseorang koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran.
- c) Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Bentuk koordinasi

Dalam pelaksanaan proyek perubahan pasti membutuhkan koordinasi, untuk itu kita perlu memahami terlebih dahulu bentuk koordinasi yang merupakan acuan atau dasar dalam melaksanakan koordinasi. Penerapan prinsip koordinasi secara tepat dapat mendukung terwujudnya proyek perubahan. Menurut Hasibuan (2007: 86-87) terdapat beberapa bentuk koordinasi, bentuk tersebut antara lain:

- a) Komunikasi

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada, tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi yang terjalin dalam rangka koordinasi harus menciptakan hubungan yang produktif. Komunikasi dilakukan secara formal dan informal, komunikasi organisasi dan individu, komunikasi eksternal dan internal.

Hubungan yang produktif hasil komunikasi yang efektif akan sangat membantu keberhasilan proyek perubahan.

Menurut Deni Darmawan (2007:2-4) komunikasi itu sendiri dapat terbagi dalam beberapa bentuk, diantaranya dalam bentuk komunikasi personal (personal communication) dan komunikasi kelompok (group communication). Selain itu komunikasi juga dapat bersifat tatap muka (face-to-face) dan melalui perantara media lain (mediated).

Menurut Tono Kartono (2008:168), dalam prosesnya komunikasi itu juga terbagi dalam dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi aktif dan komunikasi pasif. Komunikasi aktif merupakan suatu proses komunikasi yang berlangsung dengan aktif antara komunikator dengan komunikan, di mana antara keduanya sama-sama aktif berkomunikasi, sehingga terjadi timbal balik di antara keduanya. Sedangkan komunikasi pasif terjadi di mana komunikator menyampaikan informasi atau ide terhadap halayaknya atau komunikan sebagai penerima informasi, akan tetapi komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respon atau timbal balik dari proses komunikasi.

b) Integrasi

Integrasi merupakan suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan atau sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dari berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Dengan adanya integrasi, koordinasi dapat berjalan secara terarah di semua level. Dan ada beberapa bentuk-bentuk integrasi yaitu :

- a. Integrasi Fungsional, integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam suatu organisasi.
- b. Integrasi Koersif, integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa menggunakan cara koersif.
- c. Integrasi Ideologis, yakni suatu bentuk integrasi yang tidak terlihat atau nampak secara visual yang terbentuk dari ikatan spiritual atau ideologis yang kuat dan mendasar melalui proses alamiah tanpa adanya suatu paksaan dan ikatan. Interaksi ideologis ini menggambarkan adanya kesepahaman dalam nilai-nilai, persepsi, serta tujuan diantara orang-orang yang terikat menjadi satu kesatuan sosial. Syarat-syarat integrasi yang baik ialah :
 1. Pada diri masing-masing harus mengendalikan suatu perbedaan/konflik yang ada pada suatu kekuatan dan bukan malah sebaliknya.
 2. Setiap orang merasa saling dapat mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya.

c) Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan, tindakan, dan unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan

tugas atau kerja. Keserasian dalam pelaksanaan tugas mampu mempermudah penerapan koordinasi di suatu organisasi.

d) **Simplifikasi**

Simplifikasi dimaksudkan adalah bahwa perumusan organisasi yang ada harus mampu dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing-masing unit organisasi. Masing-masing unit akan mengkoordinasikan tentang tugas dan pelaksanaannya kepada masing-masing bagian yang ada. Dan simplifikasi dapat dikatakan baik apabila memenuhi syarat seperti berikut, pembahasan dan perumusan kegiatan dalam suatu organisasi harus mampu dijabarkan secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh masing-masing bagian yang ada dan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Prinsip koordinasi lain menurut Mary Follet dalam Hasibuan (2007: 88-89) studi manajemen terdapat empat prinsip yaitu :

- a. Early Stage
- b. Continuity
- c. Direct contact
- d. Reciprocal relation

Ciri-ciri Koordinasi

Menurut Handayaniingrat koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi sering dicampur-adukkan dengan kata koperasi yang sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.
2. Adanya proses (*continues process*). Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
3. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.
4. Konsep kesatuan tindakan, hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi kesatuan usaha. Berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

5. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

2. Organisasi

Pengertian organisasi menurut Stephen P. Robbins (2006: 4-7), adalah suatu kesatuan sosial yang telah terkoordinasi secara sadar. Dengan adanya sebuah batasan yang relatif dan dapat diidentifikasi serta bekerja berdasarkan yang relatif secara terus-menerus agar dapat mencapai tujuan bersama, menurut Chester Bernard (1992:28), organisasi adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk melakukan sebuah hal yang harus dibumbui dengan komunikasi. Dengan demikian akan timbul keinginan dari semua anggota agar dirinya bisa memiliki andil/usaha dalam kegiatan tersebut dalam pendapatnya ini Bernard juga membagi peranan anggota dalam sebuah organisasi dimana sebagian dari anggota harus bisa memberikan informasi, sedangkan sebagian lagi harus mengambil sebuah keputusan. Dalam berorganisasi semua orang harus aktif jika ada orang yang tidak aktif maka kegiatan bisa menjadi tidak lancar. Jika salah satu anggota kurang aktif maka manfaat yang di dapat dari organisasi tidak akan bisa didapatkan dan organisasi merupakan suatu integrasi dari sejumlah spesialis-spesialis yang bekerja sama sangat rasional dan impersonal untuk mencapai beberapa tujuan spesifik yang telah diumumkan.

Menurut Richard Scott (2008:48), pengertian organisasi ialah suatu kolektivitas yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan khusus tertentu yang sedikit banyak didasarkan pada asas kelangsungan organisasi.

Kesimpulan menurut penulis organisasi ialah suatu kumpulan beberapa orang yang bekerjasama dengan sportif dan tanggung jawab yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan juga dari beberapa pengertian yang diutarakan oleh para pakar maka menurut penulis bahwa suatu organisasi adalah suatu wadah dan proses yang didalamnya terdapat orang-orang yang saling mempengaruhi atau saling berhubungan bekerjasama dalam upaya mencapai suatu tujuan.

Dengan itu perlu diketahui bahwa dalam mencapai suatu tujuan organisasi maka dalam pelaksanaan organisasi tersebut diperlukan asas dalam suatu tujuan organisasi. Menurut Alford dan Rusel Beaty dalam Sutarto (2006), asas dalam suatu organisasi sebagai berikut :

1. Asas tujuan
2. Asas wewenang
3. Asas wewenang pokok
4. Asas penugasan kewajiban-kewajiban
5. Asas definisi
6. Asas kesamaan
7. Asas efektifitas Organisasi

Dari asas organisasi yang ada di atas merupakan suatu komitmen dari organisasi dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Kemudian dalam suatu organisasi terdapat berbagai macam bentuk organisasi sebagai berikut :

1. Organisasi jalur, militer, atau hirarki
2. Organisasi fungsional
3. Organisasi jalur dan staf
4. Panitia

Dari bentuk organisasi di atas maka disimpulkan bahwa bentuk organisasi dapat dibedakan menjadi bentuk jalur, fungsional, staf dan panitia. Guna lebih memperjelas terlebih dahulu yang membedakan adanya bentuk organisasi ditinjau dari pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggungjawab dan ditinjau dari jumlah orang yang memegang pimpinan.

Setela bentuk organisasi, maka dari hasil bentuk itu pasti memiliki fungsi atau tujuannya. Adapun fungsi atau tujuan suatu organisasi yaitu :

1. Organisasi digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi, militer, dan masalah-masalah lain;
2. Orang mungkin masuk juga masuk kelompok karena kebutuhannya diterima dan mencegah kesepian dan mencegah kesepian dan kerenggan;
3. Demikian juga organisasi dapat memberikan bantuan pada waktu orang menjumpai kesusahan;
4. Organisasi dapat memberikan tujuan dan nilai hidup yang lebih bernilai, norma prilaku, dan loyal organisasi;
5. Organisasi sosial, kerja dan bermacam-macam status dan pengakuan;
6. Organisasi dengan kehidupan mereka memberikan orang kesempatan untuk memuaskan kebutuhannya untuk mengungkapkan perasaannya dan melakukan hubungan dengan berbagai cara;
7. Perasaan keamanan seseorang sering di manfaatkan dari kelompok jika mereka mengurangi kecemasan orang dengan memberi dukungan pertahanan diikutsertakan;
8. Kadang-kadang organisasi membantu memberikan terapi takala memecahkan masalah-msalah pribadi;

Dari berberapa penjelasan tersebut suatu organisasi sangat diperlukan, hal ini karena organisasi memiliki fungsi yang sangat penting yaitu memecahkan berbagai permasalahan tidak dapat ditangani secara individu.

Organisasi sebagai sistem koordinasi

Sistem adalah suatu keseluruhan yang sangat rumit dari berbagai unsur atau factor atau hal yang saling berhubungan dan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lain sehingga semua unsure, semua faktor atau semua hal itu merupakan suatu kebulatan yang utuh. Keutuhan dan kebulatan dari semua unsur/faktor atau hal tersebut disatupadukan oleh suatu asas atau prinsip tatatertib tertentu.

Koordinasi merupakan aktifitas dan fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerjasama yang selaras dan tertib mengarah pada tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh. Pada dasarnya proses koordinasi mempunyai empat unsur penting dalam pelaksanaannya, meliputi antara lain komunikasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan mekanisme (Sulistiyowati, dkk. 1999). Koordinasi dibangun dari unsur-unsur ini. Kita dapat mengoptimalkan koordinasi dengan melakukan perbaikan dan sentuhan padanya.

Apabila tujuan yang akan dicapai itu sedemikian kompleks, hal itu akan mengakibatkan timbulnya jaringan hubungan kerja yang sangat kompleks dan rumit, sehingga memerlukan perumusan kerja yang lebih baik. Setiap pekerjaan dirumuskan dengan baik, dan setiap pekerjaan mengandung wewenang, tugas dan tanggung jawab, maka diperlukan suatu sistem penugasan kepada orang-orang yang mengkhususkan diri dalam bidang tertentu dari suatu tugas bersama. Dengan demikian setiap orang yang tergabung dalam suatu bentuk kerjasama mempunyai peran yang diikuti dengan pertanggungjawaban.

Dari uraian tersebut jelas bahwa organisasi sebagai sistem koordinasi dapat diartikan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi sebagai sistem koordinasi, adalah suatu sistem mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan dengan baik, dan masing-masing pekerjaan itu mengandung wewenang, tugas dan tanggungjawab tertentu yang memungkinkan orang-orang dari suatu organisasi dapat bekerjasama secara efektif dalam usaha mencapai tujuan.
2. Organisasi sebagai sistem koordinasi, adalah suatu sistem penugasan pekerjaan kepada orang-orang yang mengadakan kerjasama yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang tertentu dari suatu tugas bersama.
3. Organisasi sebagai sistem koordinasi, adalah suatu sistem dari aktivitas-aktivitas kerjasama dari sekelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan.
4. Organisasi sebagai sistem kerjasama adalah suatu sistem yang terencana dari pada usaha kerjasama dengan memberikan peran kepada setiap orang untuk dijalankan, wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk dilaksanakan.

Pengorganisasian Koordinasi Dinas Pariwisata dengan Dinas Kehutanan

Bentuk dari koordinasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan adalah bentuk Koalisi (*coalition*) yakni kombinasi antar dua organisasi yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Kedua lembaga tersebut memiliki struktur yang berbeda yang dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu. Akan tetapi kedua lembaga yakni Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan memiliki maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama yaitu dalam pengelolaan obyek wisata taman nasional di kabupaten malinau agar obyek wisata tersebut dapat terjaga dan terawat

keindahan alamnya, serta agar dikenal oleh banyak masyarakat dalam maupun luar negeri. Namun dalam kerjasama tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti hal timbal balik, orientasi individu, dan komunikasi.

Dalam sebuah kegiatan organisasi ada sebuah siklus atau hal timbal balik, ada masukan, proses, keluar (pelaksanaannya) dan bagaimana tanggapan di masyarakat hal tersebut terus berputar sehingga ada perbaikan-perbaikan dari masukan yang ada agar sesuai dengan yang diinginkan. Seiring berjalannya waktu tentu ada titik jenuh dari setiap individu yang menjalankan bagaimana orientasi individu untuk menentukan sikap tersebut, dan lebih penting adanya koordinasi dari kedua lembaga tersebut khususnya Dinas Pariwisata dengan Dinas Kehutanan yang menjalin hubungan kerjasama agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak tersebut sehingga dapat dilakukan dengan baik pada saat melakukan koordinasi dalam pengelolaan obyek wisata taman nasional kayan mentarang di Kabupaten Malinau.

3. *Pengelolaan Objek Wisata*

Pengelolaan menurut kamus bahasa Indonesia, yaitu suatu proses, cara, perbuatan, mengelola. atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerakan tenaga orang lain. Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut wardoyo (1980:41) memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum, pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Objek adalah sebuah konsep, abstraksi atau sesuatu yang diberi batasan jelas dan dimaksudkan untuk sebuah aplikasi. Sebuah objek adalah sesuatu yang mempunyai keadaan, prilaku, dan identitas. Keadaan dari objek adalah satu dari kondisi yang memungkinkan dimana objek dapat muncul, dan dapat secara normal berubah berdasarkan waktu, keadaan dari objek diimplimentasikan dengan kelompok propertinya (disebut atribut), berisi dari nilai property tersebut, ditambah keterhubungan objek yang mungkin dengan objek lainnya. Perilaku menentukan bagaimana sebuah objek beraksi dan bereaksi terhadap permintaan dari objek lainnya. Dipresentasikan dengan kelompok pesan yang direspons oleh objek (operasi yang dilakukan oleh objek). Wisata/Pariwisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

4. Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dinas adalah *Nomina (kata benda)* bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu; jawatan: Secara umum atau lebih singkatnya lagi makna dinas adalah segala hal yang berhubungan dengan jabatan.

Menurut Suyitno (2001) tentang Pariwisata sebagai berikut: Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya. Melibatkan beberapa komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, obyek wisata, souvenir dan lain-lain.

Menurut Dengler dalam Salim (1997: 34) bahwa hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya.

Akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal) Selanjutnya Dengler mengemukakan bahwa yang menjadi ciri hutan adalah: 1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), dan 2) pepohonan tumbuh secara berkelompok. Ahli silvikultur dan ahli manajemen hutan

Junus (1984: 3) juga berpendapat mengatakan bahwa areal yang dikelola untuk menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya atau areal yang dipertahankan agar tetap mempunyai vegetasi berkayu untuk menghasilkan manfaat-manfaat tidak langsung disebut hutan. Manfaat-manfaat tidak langsung tersebut dapat berupa rekreasi, keindahan (*estetika*), kesegaran dan kenyamanan lingkungan, dan konservasi tanah dan air. Secara umum Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Metode Penelitian

Menurut Nawawi (2005: 63) yaitu Metode Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukis keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpul data, dengan mempelajari sebagai bahan refrensi.

2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- a. Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lapangan
 - b. Wawancara mendalam yaitu mengadakan wawancara dengan beberapa *key informan* untuk menggali data dengan informasi tentang pelayanan publik di kelurahan pelabuhan kecamatan Samarinda Ilir.
 - c. Penelitian dokumen-dokumen yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik di kelurahan pelabuhan kecamatan Samarinda Ilir.
3. Dokumentasi
- Pengumpulan data dengan cara kata gorisisasi dan klasifikasi bahan yang tertulis maupun berupa gambar. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi ini, digunakan sebagai bahan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif.

Hasil Penelitian

1. Koordinasi dalam pengelolaan objek wisata

a. Komunikasi

Komunikasi berarti suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung. Dalam melaksanakan kegiatan kerja kelompok ataupun organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku tidak akan lepas dari komunikasi, sehingga dengan demikian kelompok ataupun organisasi tersebut akan selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik, untuk mencapai suatu tujuan.

b. Integrasi

Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi, organisasi, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa integrasi merupakan suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam suatu organisasi sehingga menghasilkan pola yang memiliki keserasian fungsi tertentu.

c. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan, sehingga diperoleh suatu keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja, keserasian dalam pelaksanaan tugas di suatu organisasi. Dengan demikian sinkronisasi dalam pengelolaan objek wisata adalah perpaduan antara dua atau lebih unsur ataupun organisasi yang terjadi dalam satu tempat dalam menyesuaikan, menyelaarskan kegiatan, sehingga terwujudnya suatu konsistensi, keserasian dalam pelaksanaan tugas. Sinkronisasi dapat diartikan sebagai upaya

untuk mengharmoniskan suatu fungsi atau struktur yang memiliki posisi setara atau berbeda.

d. Simplifikasi

Simplifikasi merupakan sebuah perumusan organisasi yang ada harus mampu dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing-masing unit organisasi. Masing-masing instansi akan mengkoordinasi tentang tugas dan pelaksanaan kepada masing-masing bagian yang ada. Dimana kepala dinas pariwisata dan kepala dinas kehutanan harus mampu menerangkan, menjelaskan atau menjabarkan secara sederhana program koordinasi dalam pengelolaan objek wisata.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Nasional

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung koordinasi dalam pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang di desa tanjung lapang kilometer delapan adalah dukungan dari pemerintah kabupaten malinau berupa pemberian dana dan peralatan kantor yang lengkap sebagai penunjang berjalannya proses pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang di desa tanjung lapang.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat koordinasi dalam pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang di desa tanjung lapang kilometer delapan adalah para pegawai, dikarenakan sebagian besar pegawai yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan objek wisata kurang aktif membantu kepala dinas pariwisata dan kepala dinas kehutanan dalam pengelolaan objek wisata sehingga koordinasi yang dilakukan tidak efektif dan efisien sehingga program yang dijalankan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Koordinasi dalam pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang di desa tanjung lapang kilometer delapan kabupaten malinau:

1. Komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang di desa tanjung lapang kilometer delapan masih kurang produktif dan efektif, sehingga komunikasi yang terjalin di organisasi dinas pariwisata dengan dinas kehutanan dalam rangka koordinasi tidak berjalan sesuai rencana.
2. Integrasi merupakan suatu penyatuan tindakan-tindakan dari berbagai organisasi yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata, dalam hal ini cukup baik dikarenakan pada saat melaksanakan pertemuan/rapat untuk

membahas suatu hal yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata, parah pegawai dari masing-masing organisasi memiliki toleransi saling menghormati dan tengang rasa sehingga terbentuk suatu kebulatan pemikiran yang telah ditentukan dan disepakati bersama sehingga koordinasi yang dilakukan cukup berjalan dengan baik.

3. Sinkronisasi pada saat pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang masih kurang karena interaksi yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan dinas kehutanan masih sangat minim atau kurang sehingga keserasian dalam koordinasi tidak terwujud.
4. Simplifikasi atau perumusan organisasi yang dilakukan dinas pariwisata dalam pengelola objek wisata taman nasional kayan mentarang sudah dijabarkan secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh masing-masing organisasi, namun apa yang dilakukan kepala dinas pariwisata kurang mendapat respon positif dari pegawai sehingga sebagian besar pegawai tidak mengikuti pertemuan/rapat yang diadakan maka pada saat melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan objek wisata masi banyak pengurus ataupun pegawai yang kurang mengerti tugas dan fungsi mereka sehingga sering kali terjadi perselisihan.
5. Faktor pendukung koordinasi dalam pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang di desa tanjung lapang kilometer delapan adalah dukungan dari pemerintah melalui bantuan dana dan juga kelengkapan peralatan kantor sebagai penunjang berjalanya proses pengelolaan objek wisata.
6. Faktor penghambat koordinasi dalam pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang di desa tanjung lapang kilometer delapan adalah sebagian besar staf/pegawai kurang aktif membantu dinas pariwisata dan dinas kehutanan dalam pengelolaan objek wisata sehingga membuat kinerja terhambat dan jalanya program tidak sesuai rencana.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai administrator harus melakukan atau melaksanakan komunikasi yang baik karna dengan adanya komunikasi yang dilakukan secara formal dan informal, eksternal, internal dalam organisasi maupun individu yang terjalin dalam suatu hubungan koordinasi maka terciptanya hubungan yang produktif dan efektif karna itu akan sangat membantu keberhasilan dalam pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang
2. Integrasi harus diperkuat oleh dinas pariwisata dan dinas kehutanan dalam pelaksanaan koordinasi karena itu merupakan suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan dari berbagai badan dan instansi sehingga membentuk suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah di tentukan dan disepakati bersama.

- Dengan adanya integrasi, koordinasi dalam pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang dapat berjalan searah terarah.
3. Sinkronisasi juga harus di tingkatkan dengan adanya sinkronisasi maka usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang di desa tanjung lapang kilometer delapan sehingga keserasian dinas pariwisata dengan dinas kehutanan dalam pelaksanaan tugas mampu mempermudah penerapan koordinasi di suatu organisasi.
 4. Simplifikasi harus ditingkatkan agar dinas pariwisata dan dinas kehutanan dapat merumuskan kegiatan yang ada sehingga mampu dijabarkan secara sederhana dan mudah dipahami oleh masing-masing organisasi dan masing-masing pengurus akan mengkoordinasi tentang tugas dan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang, kepada tiap-tiap bagian yang ada sehingga masing-masing staf ataupun pegawai dapat mengerti tugas mereka dalam menjalankan program sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan pertentangan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi.1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Barnard, I, Chester. 1992. *Organisasi dan manajemen, Struktur, Perilaku dan proses*. Jakarta: Gramedia
- Bramwell, B., & Lane, B. 2009. Sustainable tourism and the evolving roles in government planning. *Journal of Sustainable Tourism*.
- Deni Darmawan, 2007, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Bandung: Arum Mandiri Press.
- Fandeli, Chafid. 1995. *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberti.
- Fattah, Nanang. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Griffin,Ricky W.,(1990). *Management*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Handyaningrat, Soewarno (1999). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani (2003), *Manajemen*. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapanbelas. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu SP. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007a. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2007b. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.

- _____. 2007c. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2007d. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Johnson, Daniel, Peter Sutton dan Neil Haris. 2001. *Extreme Programming Requires Extremely Effective Communication*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Junus, Mas'ud, 1984. *Dasar Ilmu Kehutanan Buku I*, Ujungpandang: Lepas Universitas Hasanuddin.
- Kartono, Tono. 2008. *Komunikasi Dalam Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Kodhyat H. 1983. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Miftah Thoha, 2005. *Dimensi-Dimensi Prima ILMU ADMINISTRASI NEGARA*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miles, Mathew B. Dan A. Michael Huberman, saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjeptjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.
- Ndraha, T. 2003. *Kybernology 1: Ilmu Pemerintahan baru / Taliziduhu Ndraha*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Racmahdi, Lexy J. Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Refisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Robbins, Stephen. P. 2006. *Perilaku Organisasi, Edisi Bahasa Indonesia*. Klaten: PT INTAN SEJATI.
- Salim, H.S., 1997. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Scott, Richard W. 2008. *Institutions and Organizations: Ideas an Interest*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publication.
- Spillane James J. 1987, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sulistyowati, Evie Sopacua, Thinni Nurul Rochmah, dkk. 1999. *Pelaksanaan Penggerakan dan Pengawasan Pengendalian di Puskesmas. Modul Pelatihan Manajer Puskesmas*. Surabaya: Kanwil Depkes Jawa Timur.
- Sutarto. 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suyitno. 2001. *Perencanaan Wisata*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahab, Salah, 1989a. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- _____. 1989b. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Wardoyo. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wibowo, I, 2000, *Negara dan Masyarakat : Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina*, gramedia, Jakarta.
- Yoeti Oka A. 1992. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Sumber Internet

<https://yudistirapaokimilani.wordpress.com/2013/05/27/integrasi-sosial-dan-interaksi-sosial/>

<http://merengkuhbayangan.blogspot.co.id/2012/12/makalah.html>

<http://qiefranklin.blogspot.co.id/2010/11/sinkronisasi-dan-simplifikasi-dalam.html>

<http://www.seputarilmu.com/2016/01/pengertian-bentuk-4-faktor-dan-proses.html>